

BAB VI

PENUTUP

Padababpenutupini, disimpulkan beberapa poin pokok berkaitan dengan rumusan masalah dalam bentuk kesimpulan sebagai hasil penelitian. Selanjutnya pada bab ini akan diungkapkan beberapa saran sebagai penyempurna penelitian ini.

A. Kesimpulan

Beranjak dari fokus masalah, uraian data, dan temuan penelitian serta analisis hasil penelitian, maka penelitian ini menyimpulkan temuan sebagai berikut:

1. Secara historis pendirian pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara bertujuan untuk mencetak bibit ulama yang intelek dan intelek yang ulama.
2. Ada dua pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara yaitu: pertama, Pondok Pesantren KHA. Dahlan di Sipirok Tapanuli Selatan, kedua, yaitu Pondok Pesantren Muhammadiyah Kwala Madu Binjai terletak di Kabupaten Langkat. Meskipun kedua pesantren ini milik Muhammadiyah akan tetapi nama yang disematkan kepada masing-masing pesantren ternyata berbeda. Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kwala Madu menyebut dirinya sebagai pesantren bertipologi *Madrasah Boarding School* (MBS), sedangkan Pondok Pesantren KHA. Dahlan tidak mengelompokkan diri kepada tipologi pesantren tertentu. Demikian pun sesungguhnya dua pesantren ini bertipologi *khalafi* atau pesantren modern yaitu pesantren yang mengajarkan mata pelajaran umum dan berbagai macam keterampilan serta program pengembangan kemasyarakatan. Dalam ketentuan Muhammadiyah jenis pesantren ini disebut sebagai “pesantren integral” yaitu pesantren berbasis madrasah dengan pola berasrama dan pembinaan selama 24 jam.
3. Dua pesantren ini tidak mengenal kepemimpinan kyai dan tradisi pembelajaran kitab kuning yang menggunakan metode sorogan, bandongan, dan wetonan serta tidak memiliki spesifikasi keilmuan tertentu.
4. Sistem pendidikan yang terdiri dari tujuan, kurikulum, pendidik, peserta didik, proses pembelajaran, manajemen, sarana prasarana, dan iklim (budaya) pembelajaran tidak menggambarkan secara jelas dan sistemik untuk tujuan pemenuhan penyiapan calon kader ulama. Sistem pendidikan yang dijalankan masih terkonsentrasi pada pencapaian tuntutan standar kemadrasahan.

5. Ada tiga orientasi pendidikan yang ditemukan di dalam program pendidikannya yaitu orientasi keulamaan, orientasi kemodernan, dan orientasi praksis sosial. Ketiga orientasi tersebut ditemukan di dalam program pendidikan intrakurikuler, kokurikuler, hidden kurikulum, dan ekstrakurikuler. Dua pesantren ini telah melakukan langkah-langkah penguatan yang mengarahkan kepada pencapaian tiga orientasi tersebut. Setidak-tidaknya pemberian pembelajaran ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu dasar keagamaan, pembelajaran ilmu-ilmu umum, pembinaan yang meliputi aspek akidah, ibadah, akhlak, dan *mu'amalah dunyawiyah* (kemasyarakatan). Namun langkah –langkah yang dilaksanakan belum optimal untuk mengantarkan peserta didik menjadi bibit ulamaterlebih mendekati tolak ukur ulama yang dikonsepsikan oleh Muhammadiyah.
6. Ada dua alasan utamayang membuat tidak optimalnya pelaksanaan tiga orientasi pendidikan pada dua pesantren ini yaitu, pertama, sistem pendidikan yang tidak bersinergis dengan cita-cita dan tujuan institusional pesantren. Orientasi pendidikan yang dilaksanakan masih bersifat *goverment oriented*. Kedua adalah bahwa penyelenggaraan pondok pesantren di lingkungan ormas ini ternyata belum memiliki standar penyelenggaraan sebagai bahan acuan. Dua pesantren ini masih berpedoman kepada peraturan penyelenggaraan madrasah yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan serta ketentuan Penyelenggaraan Pondok Pesantren yang dikeluarkan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah.
7. Tidak terdapat perbedaan yang bersifat substansial pada dua pesantren ini. Dilihat dari usia antara dua pesantren ini terpaut 26 tahun. Pondok Pesantren KHA. Dahlan telah berusia 56 tahun yang pendiriannya digagas oleh Pimpinan Cabang, sedangkan Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kwala Madu berusia 30 tahun digagas pertama kali oleh Pimpinan Daerah Kotamadya Binjai. Dari sisi grafik perolehan siswa Pondok Pesantren Muhammadiyah Kwala Madu jauh lebih stabil pada kisaran angka 650-700 santri, sedangkan PP KHA. Dahlan sangat labil dan sangat fluktuatif yang kini hanya mengasuh lebih kurang 220 santri. Sedangkan dari sisi menejemen Pondok Pesantren Kwala Madu lebih sehat dan kondusif sehingga proses pembelajaran dan keseluruhan sistem pendidikan lebih dinamis dan lebih tertib dibanding dengan Pondok Pesantren KHA Dahlan Sipirok yang sering terganggu dari sisi

pengelolaan. Dalam konteks sekarang Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kwala Madu sedikit lebih kaya dalam pembelajaran ilmu-ilmu keagamaan plus kepondokan meskipun tidak pernah membuka Jurusan Agama. Sedangkan Pondok pesantren KHA. Dahlan Sapiro mengalami penciutan ilmu-ilmu keagamaan. Namun dari orientasi praksis sosial Pondok Pesantren KHA. Dahlan menunjukkan aktivitas yang lebih dekat dengan masyarakat dan nuansa keulamaan dan kemuhammadiyah sedikit lebih kental.

8. Secara empirik dinamika proses pembelajaran pada dua pesantren ini menunjukkan nuansa rutinitas dan cenderung monoton tidak menggambarkan progresifitas dan etos pembaharuan yang teraplikasi dan terimplementasi dalam lapangan pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait dengan fokus penelitian yaitu:

1. Kepada para guru, direktur Pesantren sebagai pelaku pendidikan dan Pimpinan Daerah sebagai pelaksana pendidikan pesantren, hendaknya melakukan penguatan dan pembenahan terhadap sistem pendidikan pesantren sehingga menjadi sebuah sistem yang saling terkait untuk mewujudkan tujuan pesantren Muhammadiyah. Pembenahan terhadap sistem pendidikan merupakan solusi terhadap berbagai permasalahan yang melingkupi dua pesantren ini.
2. Kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai pembuat kebijakan, dan Lembaga Pemberdayaan Pondok Pesantren (LP2M) hendaknya menetapkan tiga orientasi pendidikan pesantren sebagai orientasi yang manunggal. Penetapan tiga orientasi pendidikan ini sesuai dengan idealita sistem pesantren Muhammadiyah sebagai perpaduan dari sistem madrasah, sistem kepesantrenan modern, dan kekaderan ulama.
3. Kepada PP Muhammadiyah hendaknya sesegera mungkin menetapkan standar Pendidikan Pondok Pesantren Muhammadiyah. Standar dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Standar Proses; (2) standar Isi; (3) standar penilaian; (4) standar pengelolaan; (5) standar pendidik dan kependidikan; (6) standar sarana prasarana; (7) standar pembiayaan, (8) standar kompetensi lulusan. Standar Pendidikan Pondok Pesantren Muhammadiyah telah dihasilkan melalui Rapat Kerja Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah PP Muhammadiyah pada tanggal 11-13 Desember 2015 di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), yang

ditindaklanjuti dengan hasil Rapat Koordinasi Nasional Pondok Pesantren Muhammadiyah se-Indonesia pada tanggal 28-30 Oktober 2016 di Makassar. Dengan pentaanfidzan standar pendidikan pesantren ini diharapkan menjadi solusi terhadap permasalahan sistem dan orientasi pendidikan pesantren Muhammadiyah.

4. Kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah hendaknya lebih intens membicarakan lembaga pendidikan ini terlebih melalui forum-forum resmi seperti forum Musyawarah Wilayah melihat pentingnya lembaga pendidikan ini sebagai wadah perkaderan calon kader ulama. Kurangnya perhatian stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan pesantren Muhammadiyah akan menjadi beban moral yang pada akhirnya tidak memberikan sumbangsiah terhadap pendidikan Muhammadiyah.
5. Kepada Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah (LP3) PW Muhammadiyah sebagai lembaga resmi yang dibentuk melalui amanah Musyawarah yang secara struktural bertugas untuk melakukan identifikasi, pengembangan, merupakan garda terdepan pembentuk kader ulama hendaknya langsung terjun ke pesantren untuk melakukan pembinaan-pembinaan ke arah menguatkan tiga orientasi pendidikan pesantren dimaksud.
 6. *Itihad al Ma'ahid al Muhammadiyah* (ITMAM) sebagai organisasi yang mewadahi Pondok Pesantren Muhammadiyah se Indonesia hendaknya mampu memosisikan diri sebagai sarana komunikasi dan penyambung lidah berbagai permasalahan pesantren kepada Pimpinan Persyarikatan, pemerintah, pihak swasta, dan kepada pihak lainnya. Sebagai lembaga yang bersifat kultural, ITMAM hendaknya dapat menjalin kerjasama dengan induk persyarikatan dalam memajukan Pesantren Muhammadiyah.
 7. Pimpinan Daerah Muhammadiyah sebagai pelaksana pendidikan pesantren diharapkan mampu membangun kerjasama secara sinergis dengan Pimpinan Wilayah dan pihak-pihak terkait serta diharapkan dapat melakukan pengawasan dan pembinaan kebawah dalam mewujudkan pesantren sebagai pencetak ulama. Pondok pesantren telah memberikan jasa yang berarti untuk negeri ini, untuk itu kepada pihak pemerintah hendaknya lebih meningkatkan perhatiannya terhadap pendidikan pesantren dalam bentuk moral dan material.
 8. Akhirnya penelitian ini bukan penelitian yang bersifat final, untuk itu kepada para peneliti berikutnya hendaknya melakukan penelitian lanjutan yang

bersifat pengembangan terhadap pesantren Muhammadiyah di Sumatera Utara.